



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PERTANIAN

Kayu Aro Sukarami Telp/Fax (0755) 31147
Aro Suka



LAPORAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2017

**DINAS PERTANIAN KABUPATEN SOLOK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kepala SKPD berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai entitas akuntansi dengan memberikan pengungkapan yang berhubungan dengan masing-masing pos yang ada dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Pertanian pada hakekatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala Dinas kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat diharapkan memberikan informasi mengenai kinerja dan realisasi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian selama satu periode pelaporan. Dinas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan keuangan

Akuntansi dan laporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Solok Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok ;
9. Peraturan Bupati Solok No. 28 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017.
10. Peraturan Bupati Solok No. 9 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penulisan catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera di dalam :

- Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- Neraca

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

- Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

- Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan Keuangan menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analitis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Capaian kinerja keuangan Dinas Pertanian dalam laporan realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan, ini terlihat dari selisih serapan dan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Belanja operasional realisasi sebesar Rp. 26.706.188.204,- atau 92.80 % dari anggaran yang tersedia Rp. 28.777.325.543,-. Sementara itu untuk belanja modal realisasi anggaran sebesar Rp. 465.744.810,- atau 97.38 % dari jumlah anggaran yang tersedia Rp. 478.300.000,-.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input) sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

a. Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1.	Belanja Operasi	28.777.325.543.00	26.706.088.204.00	92,80
	- Belanja Pegawai	11.584.228.362.00	11.423.543.063.00	98,61
	- Belanja Barang	17.193.097.217.00	15.282.545.141.00	88,89
2.2.	Belanja Modal	478.300.000.00	465.744.810.00	97,38
	- Blnj. Tanah	0.00	0.00	00,00
	- Blnj. Peralatn dan Mesin	297.965.000.00	286.291.060.00	96,08
	- Blnj. Gdg dan Bangunan	157.835.000.00	157.003.750.00	99,47
	- Blnj. Irigasi dan Jaringan	22.500.000.00	22.450.000.00	99,78
	- Blnj. Aset Tetap lainnya	-	-	-
	- Blnj. Aset lainnya	-	-	-

2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan data diatas terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian realisasi anggaran yang belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan diantaranya :

- Adanya upaya efisiensi melalui pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.
- Adanya perkiraan berlebih (over estimate) dalam alokasi target anggaran pada saat perencanaan dimana tidak sesuai dengan kebutuhannya yang sebenarnya.
- Adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sehingga mengurangi serapan anggaran.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN

3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan Dinas Pertanian

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas pertanian Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan kebijakan akuntansi perlu diungkapkan berdasarkan pertimbangan manajemen sehingga membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Dinas Pertanian menyajikan antara lain:

3.1.1. Pendapatan-LRA

Target pendapatan Dinas Pertanian yang tercantum dalam APBD adalah sebesar Rp. 273.540.000,- yang merupakan hasil retribusi daerah dimana realisasi pendapatan tahun 2017 Dinas Pertanian adalah sebesar Rp. 346.564.000,- atau 126,70 % dari target, hal ini terbesar didapat dari target retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3.1.2. Belanja

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2017 Dinas Pertanian mendapatkan alokasi dana untuk belanja pegawai sebesar Rp. 11.584.228.326,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.423.543.063,- atau 98,61% dari total anggaran.

b. Belanja Barang dan Jasa

Dari total 47 kegiatan yang ada dalam APBD Dinas Pertanian terdapat anggaran sebesar Rp. 17.193.097.217,- yang merupakan belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar Rp. 15.282.545.141,- atau 88,89% dari total anggaran, hal ini tidak sesuai dengan target yang seharusnya dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi yang menyebabkan serapan anggaran rendah.

c. Belanja Modal

Belanja modal yang terdapat dalam APBD Dinas Pertanian TA. 2017 terbagi pada:

- 1) belanja peralatan dan mesin Rp. 297.965.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 286.291.060,- atau 96,08 % dari total anggaran
- 2) belanja gedung dan bangunan Rp. 157.835.000,- dengan realisasi Rp. 157.003.750,- atau 99,47 %.
- 3) Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 22.500.000,- dengan realisasi Rp. 22.450.000,- atau 99,78% dari total anggaran.

3.1.3 Pendapatan –LO

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Target pendapatan yang ada dalam APBD Dinas Pertanian TA. 2017 adalah pendapatan retribusi daerah yang terbagi pada:

- 1) Retribusi pasar grosir/pertokoan sebesar Rp. 149.500.000,- dengan realisas Rp. 58.968.000,- atau 39,44%. Dibandingkan dengan target yang diharapkan realisasi pendapatan dari pasar grosis sangat rendah hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran dari pedagang untuk membayar biaya retribusi dan kelemahan pengawasan.
- 2) Retribusi rumah potong hewan dengan target sebesar Rp. 30.540.000,- dan realisasi Rp. 3.570.000,- atau 11,69%, rendahnya capaian target pendapatan dikarenakan sedikitnya masyarakat menggunakan fasilitas rumah potong, hal ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam bangunan rumah potong.
- 3) Retribusi penjualan produksi usaha daerah dengan target sebesar Rp. 93.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 284.026.000,- atau 303,77 %.

Seluruh pendapatan asli daerah telah disetorkan ke kas daerah dan sampai keadaan 31 Desember 2017 tidak terdapat sisa kas pada bendahara penerima sesuai dengan berita acara penutupan kas sebagaimana terlampir.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pada tahun TA. 2017 Dinas Petanian mendapatkan dana dari Provinsi/Pusat berupa Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/APBN-P sebesar Rp. 17.427.373.777,- dan ini meningkat sebanyak Rp. 10.661.212.827,- dari Tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 6.766.160.950,-

3.1.4. Beban

Pada tahun 2017 Beban Operasional Dinas Pertanian sebesar Rp. 45.487.902.516,92,- yang terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Dinas Pertanian pada Tahun 2017 sebesar Rp. 11.568.123.438,- yang terdiri dari; Gaji dan Tunjangan Rp. 9.022.879.758,-; Tambahan Penghasilan PNS Rp. 1.603.463.305,-; uang lembur Rp. 32.260.000,-; Honorarium Non PNS Rp. 764.940.000,- dan Utang Gaji Pegawai Rp. 144.580.375,-.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinas Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp. 3.231.263.526,- nilai tersebut terdiri dari; Belanja Barang Rp. 3.158.995.826,-, Persediaan Rp. 71.686.850,- dan persediaan eks Dinas Perikanan dan Peternakan Rp. 580.850,-.

c. Beban Jasa

Beban Jasa Dinas Pertanian pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.256.109.854,- yang terdiri dari; Belanja Jasa Kantor Rp. 1.831.006.224,-; Belanja Premi Asuransi Rp. 5.544.930,-; Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 135.471.200,-; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir Rp. 28.137.500,-; Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp. 30.800.000,-; Belanja Sewa Alat Berat Rp. 25.300.000,-; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Rp. 10.000.000,- dan Honorarium PNS/Non PNS Rp. 181.450.000,- serta belanja barang yang diserahkan pada pihak ke tiga/masyarakat Rp. 8.400.000,-

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp. 127.965.875,- terdiri dari; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 115.213.375,- dan Belanja Pemeliharaan Rp. 12.752.500,-

e. Beban Perjalanan Dinas

Pada Tahun 2017 beban perjalanan dinas pada Dinas Pertanian adalah sebesar Rp. 1.807.442.436,-

f. Beban Hibah

Pada Tahun 2017 beban Hibah Dinas Pertanian mencapai Rp. 24.761.997.927,- yang terdiri dari Belanja Hibah Barang atau Jasa Rp. 7.334.624.150,- dan Hibah Dana Dekonsentrasi

Rp. 17.427.373.777,-

g. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Dinas Pertanian Tahun 2017 adalah Rp. 1.138.940.017,63

h. Beban lainnya

Beban lainnya pada Dinas Pertanian adalah sebesar Rp. 605.807.000,- yang terdiri dari Rp. 3.280.000,-; uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Rp. 62.250.000,-; belanja makan dan minuman Rp. 480.563.500,-; belanja pakaian kerja Rp. 44.178.500,- dan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu Rp. 15.535.000,-.

3.1.5. Aset

a. Aset Lancar

- Kas Bendahara pengeluaran sampai keadaan 31 Desember 2017 adalah nihil sesuai dengan berita acara penutupan kas bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu dan bendahara penerima (terlampir)
- Nilai persediaan akhir barang pakai habis sampai pada keadaan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 28.629.150,- (berita acara pemeriksaan persediaan dan rincian terlampir)
- Piutang pada keadaan 31 Desember 2017 adalah nihil

b. Aset Tetap

- Tanah

Pada tahun 2016 nilai aset tanah pada Dinas Pertanian sebesar Rp. 1.117.175.000,- dimana selama tahun 2017 terjadi penambahan nilai tanah sebesar Rp. 115.920.000,- yang merupakan mutasi dari SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan, dan penghitungan kembali nilai tanah sebesar Rp. 1.274.854.000,- sehingga nilai aset tanah menjadi Rp. 2.507.949.000,-.

- Peralatan dan Mesin

Nilai aset dinas pertanian keadaan 31 Desember 2016 adalah Rp. 5.644.026.766,- dan selama tahun 2017 terdapat penambahan nilai aset dari belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 286.291.060,-, mutasi dari SKPD lain sebesar Rp. 2.271.896.445,- terdiri dari eks Dinas Pertambangan Rp. 115.499.000,-, eks Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rp. 555.034.524,- eks Dinas Perikanan dan Peternakan Rp. 1.466.362.921,- dan reklas dari rusak berat PPKD Rp.

135.000.000,- (Berita Acara mutasi Barang terlampir) serta penambahan dari penghitungan ulang aset yang bernilai Rp. 83.180.000,- dan nilai aset berkurang sebanyak Rp. 156.367.500,- yang terdiri dari rusak berat Rp. 64.135.500,-, ekstracompatabel Rp. 5.005.000,- dan tidak ditemukan sebesar Rp. 87.227.000,- sehingga nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin sampai keadaan 31 Desember 2017 adalah Rp. 8.129.026.771,- (Kartu Inventaris Barang B, Berita Acara aset rusak berat dan tidak ditemukan terlampir)

- Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2016 nilai aset yang berupa gedung dan bangunan adalah Rp. 11.953.957.782,- dan sampai keadaan 31 Desember 2017 nilai aset tetap untuk gedung dan bangunan adalah Rp. 17.080.434.736,- nilai ini diapatkan dari; belanja modal tahun 2017 Rp. 157.003.750,- ; mutasi dari eks Dinas Perikanan dan Peternakan Rp. 5.089.898.684,- ; reklas dari rusak berat dari eks Dinas Perikanan dan Peternakan Rp. 39.031.200,- dan berkurang sebanyak Rp. 159.456.680,- yang terdiri dari; rusak berat setelah mutasi dari eks Dinas Perikanan dan Peternakan Rp. 34.925.000,- ; rusak berat Dinas Pertanian Rp. 85.976.100,- ; koreksi double catat dengan BPBD Rp. 30.155.580,- dan diserahkan ke masyarakat Rp. 8.400.000,- (KIB C terlampir).

- Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo awal per 31 Desember 2016 nilai aset untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah Rp. 7.837.389.194,49, pada tahun 2017 terdapat penambahan sebesar Rp 439.681.000,- yang terdiri dari belanja modal tahun 2017 Rp. 22.450.000,- dan mutasi dari eks Dinas Perikanan dan Peternakan Rp. 417.231.000,- dan dikoreksi sebesar Rp. 0,49,- (KIB D terlampir).

- Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2017 untuk jenis aset tetap lainnya adalah nihil.

- Konstruksi dalam pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2017 untuk jenis aset berupa konstruksi dalam pengerjaan adalah nihil.

- Akumulasi penyusutan

Akumulasi penyusutan untuk aset tetap per 31 Desember 2016 pada Dinas Pertanian adalah Rp. -12.429.136.643,-, pada tahun 2017 terdapat penambahan yang terdiri dari; mutasi dari SKPD lain Rp. -1.780.940.326,14, koreksi sebesar Rp. 1.315.303.213,55, beban penyusutan 2017 Rp. -1.138.173.310,92 dan akumulasi penyusutan Kib. C Rp. 27.874.422,- sementara akumulasi penyusutan untuk aset lainnya sebesar Rp. -27.874.422,-

c. Aset Lainnya

- Tuntutan Ganti Rugi

Saldo aset untuk tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2017 adalah nihil.

- Aset Kondisi Rusak Berat

Kondisi akhir tahun 2016 nilai aset kondisi rusak berat sebesar Rp. 893.092.191,-, dimana pada tahun 2017 terdapat penambahan sebesar Rp. 185.036.600,-, mutasi dari SKPD lain sebesar Rp. 472.721.070,-, dan berkurang sebanyak Rp. 199.323.445,- yang terdiri dari

extracompatible Rp. 57.423.745,-, reklas ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 39.031.200,-, dan diserahkan kemasyarakatan sebesar Rp. 102.868.500,- sehingga jumlah aset lainnya sampai dengan kondisi 2017 sebesar Rp. 1.351.526.416,- (berita acara terlampir)

- Aset Lain-lain

Nilai extracompatible per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 240.002 dan selama tahun 2017 terjadi penambahan sebesar Rp. 5.005.000,-, mutasi dari SKPD lain Rp. 16.563.770,- dan reklas/koreksi dari rusak berat Rp. 57.423.745,-.

- Tidak Ditemukan

Nilai aset yang tidak ditemukan sampai keadaan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 87.227.000,- yang terdiri dari mutasi eks Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rp. 8.450.000,- dan barang yang tidak ditemukan sesudah serah terima dari eks Dinas Perikanan dan Peternakan Rp. 78.777.000,- (berita acara terlampir)

3.1.6. kewajiban

Pada tahun 2016 kewajiban Dinas Pertanian adalah sebesar Rp. 1.247.021.348,- dan Kewajiban Dinas Pertanian selama tahun 2017 adalah utang gaji pegawai sebesar Rp. 144.580.375,- dan yang masih tertinggal per 31 Desember 2017 adalah Nihil.

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas awal Dinas Pertanian adalah Rp. 13.890.068.303,49, ekuitas dana Dinas Pertanian sampai keadaan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 23.148.569.119,78, dimana nilai tersebut didapatkan dari Mutasi tambah Kib A dari Dinas Peternakan Rp. 115.920.000,-, penilaian ulang tanah Rp. 1.274.854.000,-, mutasi tambah Kib B dari SKPD lain sebesar Rp. 2.271.896.445,-, Penilaian Ulang Kib B sebesar Rp. 83.180.000,-, reklas Kib B ke extracom Rp. 5.005.000,-, mutasi tambah dari Kib C dari Dinas Peternakan Rp. 5.089.898.684,-, mutasi tambah Kib D Rp. 417.231.000,-, mutasi tambah Kib B dari SKPD lain rusak berat Rp. 211.426.000,-, mutai tambah Kib C dari SKPD lain rusak berat Rp. 261.295.070,-, reklas Kib B rusak berat ke extracom Rp. 57.423.745,-, hibah ke masyarakat Kib E Rp. 102.868.500,-, koreksi kurang Kib. C Rp. 30.155.580,-, koreksi kurang Kib. D 0,49, koreksi tambah akumulasi penyusutan dari SKPD lain Rp. 1.915.940.326,14, koreksi perhitungan saldo awal akumulasi penyusutan Rp. 1.315.303.213,55, koreksi tambah persediaan Rp. 580.850,-, koreksi RK-PPKD setor kas bendahara Rp. 20.269.360,- dan utang belanja modal tahun 2016 Rp. 1.247.021.348,-.

3.2. Penerapan Basis Kas untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang menerima anggaran atau mengelola barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi atau transaksi keuangan. Entitas pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan secara periodik. Entitas pelaporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Solok merupakan entitas akuntansi Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 adalah pencatatan berbasis kas untuk pengakuan transaksi

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan berbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan. serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan keuangan adalah pencatatan berbasis kas dan berbasis Akrual sehingga informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan asset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas pertanian Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan kebijakan akuntansi perlu diungkapkan berdasarkan pertimbangan manajemen sehingga membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Solok berkedudukan di ibu kota Kabupaten Solok yaitu Arosuka.

Sesuai peraturan daerah tersebut, Dinas Pertanian memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pertanian Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Solok terdiri satu Kepala, satu sekretaris, 6 bidang, 3 sub bagian dan 18 seksi

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur Dinas Pertanian jumlah sumber daya aparatur dinas keadaan 31 Desember 2016 sebanyak 170 orang yang terdiri dari 93 orang PNS, 19 orang Tenaga Harian Lepas dan 58 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

C. Komposisi Pegawai (Kondisi 31 Desember 2016)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Solok mempunyai pegawai terdiri dari :

No.	Golongan (Pegawai Negeri Sipil)	Keadaan 31 Desember 2016 (orang)	Keadaan 31 Desember 2017 (orang)
1	IV	17	18
2	III	80	70
3	II	2	4
4	I	3	1
	Jumlah	102	93

Disamping PNS juga ada Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagai berikut :

No.	Golongan (THL/THL-TBPP)	Keadaan 31 Desember 2016 (orang)	Keadaan 31 Desember 2017 (orang)
5	Pegawai Harian Lepas	22	20
6	THL- TBPP	57	57
	Jumlah	79	77

Sedangkan sebaran keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Keadaan 31 Desember 2016 (orang)	Keadaan 31 Desember 2017 (orang)
1	S3	-	-
2	S2	5	5
3	S1	61	57
4	D III	8	7
5	D II	-	-
6	SLTA	27	23
7	SLTP	1	1
8	SD	-	-
	Jumlah	100	93

BAB VII PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi Prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Solok telah menyusun Laporan Keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian akan memudahkan bagi semua stakeholders yang membutuhkan informasi dari Penyajian Laporan keuangan.

Arosuka. Januari 2018
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok

Ir. ADMAIZON
NIP. 19630530 199303 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Solok yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem penendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Arosuka. Januari 2018

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. ADMIZON

NIP. 19630530 199303 1 002

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Solok yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Neraca ; (c) Laporan Operasional ; (d) Laporan Perubahan Ekuitas ; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Arosuka, tanggal Januari 2018
Pengguna Anggaran

(Ir. H. ADMAIZON)

NIP. 19630530 199303 1 002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir Dengan 31 Desember 2017**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (RP)		Lebih/(Kurang) (RP)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	273.540.000,00	346.564.000,00	(73.024.000,00)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	273.540.000,00	346.564.000,00	(73.024.000,00)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	273.540.000,00	346.564.000,00	(73.024.000,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			-
	Jumlah	273.540.000,00	346.564.000,00	(73.024.000,00)
				-
2	BELANJA	29.255.625.543,00	27.171.833.014,00	2.083.792.529,00
2,1	BELANJA OPERASI	28.777.325.543,00	26.706.088.204,00	2.071.237.339,00
2.1.1	Belanja Pegawai	11.584.228.326,00	11.423.543.063,00	160.685.263,00
2.1.2	Belanja Barang	17.193.097.217,00	15.282.545.141,00	1.910.552.076,00
				-
2,2	BELANJA MODAL	478.300.000,00	465.744.810,00	12.555.190,00
2.2.1	Belanja Tanah			-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	297.965.000,00	286.291.060,00	11.673.940,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	157.835.000,00	157.003.750,00	831.250,00
2.2.4	Belanja Jalan , Irigasi dan Jaringan	22.500.000,00	22.450.000,00	50.000,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			-
				-
	Jumlah	29.255.625.543,00	27.171.833.014,00	2.083.792.529,00
	Surplus / (Defisit)	(28.982.085.543,00)	(26.825.269.014,00)	(2.156.816.529,00)

Arosuka, Januari 2018

Kepala SKPD

(Ir. H. ADMAIZON)

NIP. 19630530 199303 1 002

Lampiran II

Cara Pengisian pada Lampiran II (Laporan Realisasi Anggaran):

- 1 Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- 2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan dan belanja menurut jenisnya.
- 3 Kolom 3 diisi dengan jumlah kumulatif anggaran dengan uraian sbb :
 - untuk pendapatan diisi dengan jumlah kumulatif pendapatan sesuai dengan jenis pendapatan
 - Untuk belanja operasi diisi dengan jumlah Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung sesuai dengan jenis belanjanya
 - Untuk Belanja Modal diisi dengan jumlah Belanja Modal dengan ketentuan sbb:

No	Jenis Belanja Modal	Objek Belanja
1	Tanah	- Tanah
2	Belanja Peralatan dan Mesin	- Belanja Modal Alat-alat Berat - Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor - Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor - Belanja Modal Alat-alat Angkutan Air Bermotor - Belanja Modal Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor - Belanja Modal Alat Angkutan Udara - Belanja Modal Alat-alat Bengkel - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Mebeleur - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur - Belanja Modal Pengadaan Penghias RT - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium - Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota - Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
3	Belanja Gedung dan Bangunan	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Belanja Modal Konstruksi Jalan - Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air - Belanja Modal Konstruksi Jembatan - Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	- Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan - Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

- 4 Kolom 4 diisi dengan Realisasi SPJ sesuai dengan pengelompokan kolom 3
- 5 Kolom 5 diisi dengan:
 - untuk pendapatan diisi selisih antara realisasi anggaran dengan anggaran setelah perubahan (4-3)
 - untuk belanja diisi selisih antara anggaran setelah perubahan dengan realisasi (3-4)

BUPATI SOLOK

H. GUSMAL, SE.MM

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
NERACA DINAS PERTANIAN
Per 31 Desember Tahun 2017 dan Tahun 2016

URAIAN	TAHUN 2017	MUTASI BARANG ANTAR SKPD	TAHUN 2016
ASET	23.293.149.494,78	15.252.588.651,49	15.137.089.651,49
ASET LANCAR	28.629.150,00	120.585.360,00	120.585.360,00
Kas	-	20.269.360,00	20.269.360,00
- Kas di Bendahara Penerimaan			
- Kas di Bendahara Pengeluaran		20.269.360,00	20.269.360,00
- Kas Lainnya - Pajak Belum Disetor			
Piutang	-	-	-
- Piutang Pegawai			
- Penyisihan Piutang Pegawai			
- Piutang Pegawai Netto		-	-
- Penyisihan Piutang			
- Belanja Dibayar Dimuka			
- Piutang Lainnya			
- Persediaan	28.629.150,00	100.316.000,00	100.316.000,00
Jumlah Aset Lancar	28.629.150,00	120.585.360,00	120.585.360,00
ASET TETAP	21.853.641.350,78	14.238.911.100,49	14.123.412.100,49
- Tanah	2.507.949.000,00	1.117.175.000,00	1.117.175.000,00
- Peralatan dan Mesin	8.129.026.771,00	5.759.525.766,00	5.644.026.766,00
- Gedung dan Bangunan	17.080.434.736,00	11.953.957.782,00	11.953.957.782,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.277.070.194,00	7.837.389.194,49	7.837.389.194,49
- Aset Tetap Lainnya	-	-	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
- Akumulasi Penyusutan	(14.140.839.350,22)	(12.429.136.642,00)	(12.429.136.642,00)
Jumlah Aset Tetap	21.853.641.350,78	14.238.911.100,49	14.123.412.100,49
ASET LAINNYA	1.410.878.994,00	893.092.191,00	893.092.191,00
- Aset Kondisi Rusak Berat	1.351.526.416,00	893.092.191,00	893.092.191,00
- Tagihan Penjualan Angsuran			
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
- Aset Tak Berwujud	-		
- Aset Lain-lain	-		
-Tidak Ditemukan	87.227.000,00		
- Akumulasi Penyusutan			

	(27.874.422,00)		
JUMLAH ASET	23.293.149.494,78	15.252.588.651,49	15.137.089.651,49
KEWAJIBAN	144.580.375,00	-	1.247.021.348,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	144.580.375,00	-	1.247.021.348,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			1.247.021.348,00
Utang Pajak pada Negara		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja	144.580.375,00		
Utang Jangka Pendek Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	144.580.375,00	-	1.247.021.348,00
JUMLAH KEWAJIBAN	144.580.375,00	-	1.247.021.348,00
EKUITAS	23.148.569.119,78	15.232.319.291,49	13.890.068.303,49
Euitas	23.148.569.119,78	15.232.319.291,49	13.890.068.303,49
JUMLAH EKUITAS	23.148.569.119,78	15.232.319.291,49	13.890.068.303,49
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23.293.149.494,78	15.232.319.291,49	15.137.089.651,49

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir Dengan 31 Desember 2017 dan
2016

Nomor Urut	Uraian	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN	17.773.937.777,00	6.766.160.950,00	11.007.776.827,00	61,93212199
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.773.937.777,00	6.766.160.950,00	11.007.776.827,00	61,93212199
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	346.564.000,00		346.564.000,00	100
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.427.373.777,00	6.766.160.950,00	10.661.212.827,00	61,17509708
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	17.773.937.777,00	6.766.160.950,00	11.007.776.827,00	61,93212199
2	BEBAN	45.497.650.073,63	20.292.780.347,00	25.204.869.726,63	55,39817922
2,1	BELANJA OPERASI	45.497.650.073,63	20.292.780.347,00	25.204.869.726,63	55,39817922
2.1.1	Beban Pegawai	11.568.123.438,00	7.802.180.482,00	3.765.942.956,00	32,55448454
2.1.2	Beban Persediaan	3.231.263.526,00	4.113.186.207,00	(881.922.681,00)	-27,293431
2.1.3	Beban Jasa	2.256.109.854,00		2.256.109.854,00	
2.1.4	Beban Pemeliharaan	127.965.875,00		127.965.875,00	
2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	1.807.442.436,00	6.766.160.950,00	(4.958.718.514,00)	-274,3500106
2.1.6	Beban Hibah	24.761.997.927,00		24.761.997.927,00	
2.1.7	Beban Penyusutan	1.138.940.017,63	1.611.252.708,00	(472.312.690,37)	
2.1.8	Beban Lain-lain	605.807.000,00		605.807.000,00	
	Jumlah Beban Operasi	45.497.650.073,63	20.292.780.347,00	25.204.869.726,63	55,39817922
	JUMLAH BEBAN	45.497.650.073,63	20.292.780.347,00	25.204.869.726,63	55,39817922
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(27.723.712.296,63)	(13.526.619.397,00)	(14.197.092.899,63)	51,20920585

Arosuka, Januari 2018

Kepala SKPD

(Ir. H. ADMAIZON)

NIP. 19630530 199303 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK		
DINAS PERTANIAN		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
Untuk Periode Anggaran Yang Berakhir Dengan 31 Desember 2017 dan 2016		
	URAIAN	2017
	EKUITAS AWAL	13.890.068.303,49
	SURPLUS/DEFISIT LO	(27.723.712.296,63)
	RK PPKD	26.825.269.014,00
	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR	
	Mutasi Tambah Kib A dari dinas Peternakan	115.920.000,00
	Penilaian ulang Tanah	1.274.854.000,00
	Mutasi Tambah Kib B dari SKPD Lain	2.271.896.445,00
	Penilaian ulang Kib B	83.180.000,00
	Reklas Kib B ke extracom	(5.005.000,00)
	Mutasi Tambah Kib C dari dinas Peternakan	5.089.898.684,00
	Mutasi Tambah Kib D dari SKPD Lain	417.231.000,00
	Mutasi Tambah Kib B dari SKPD Lain Rusak berat	211.426.000,00
	Mutasi Tambah Kib C dari SKPD Lain rusak berat	261.295.070,00
	Reklas Kib B rusak Berat ke extracom	(57.423.745,00)
	Reklas Kib E rusak Berat diserahkan ke masyarakat	(102.868.500,00)
	Koreksi Kurang Kib C	(30.155.580,00)
	Koreksi Kurang Kib D	(0,49)
	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan dr skpd lain	(1.915.940.326,14)
	Koreksi perhitungan saldo awal Akumulasi Penyusutan	1.315.303.213,55
	Koreksi tambah persediaan	580.850,00
	Koreksi RKPPKD Setor Kas Bendahara	(20.269.360,00)
	Utang Belanja Modal Tahun 2016	1.247.021.348,00
	EKUITAS AKHIR	23.148.569.119,78
		Arosuka, Januari 2018
		Kepala SKPD
	23.148.569.119,78	
		<u>Ir. H. ADMAIZON</u>
		NIP. 19630530 199303 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERTANIAN

PENDAHULUAN		
BAB I	Pendahuluan	
	1,1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1,2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1,3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD	
	2,1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2,2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3,1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
		3.1.1 Pendapatan -LRA
		3.1.2 Belanja
		3.1.3 Transfer
		3.1.4 Pembiayaan
		3.1.5 Pendapatan - LO
		3.1.6 Beban
		3.1.7 Aset
		3.1.8 Kewajiban
		3.1.9 Ekuitas Dana
	3,2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansinya/entitas pelaporan menggunakan basis akrual pada SKPD
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
BAB VII	Penutup	

Arosuka, Januari 2018

Pengguna Anggaran

(Ir. H. ADMAIZON)
NIP. 19630530 199303 1
002